|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Informasi****(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)** | **Dasar Hukum****Pengecualian Informasi** | **Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)** | **Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)** |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dokumen/ Database/Arsip ASN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan olehpihak lain | Melindungikerahasiaan nominal Rupiah |
| 2 | Daftar Sasaran dan Penilaian Kerja ASN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindurigi data pribadi ASN yangbersifat rahasia |
| 3 | Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengurigkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi Ai3N yang bersifat rahasia |
| 4 | Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat **rahasia** | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| 5 | Biodata elektronik ASN(database) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia |
| 6 | Nominal Rupiah yang tertera dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa | * UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I dan huruf j
* Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya
 | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia |
| 7 | Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Sampai dengan pelantikan | Merugikan proses penyusurian kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |
| 8 | Arsip dinamis yang menurutsifatnya rahasia | * UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44
* UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i
 | Tidak terbatas | Merugikan prosespenyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi kerahasiaan dokumen. |
| 9 | Dokumen Rincian HPS (HargaPerkiraan Sendiri) | * UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I dan huruf j
* Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya
 | Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa | Menghambatkesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila bukamenimbulkan penilaian tidak obyektif) | Efisiensi Anggarankarena diperoleh penawaran harga yang wajar |
| 10 | Dokumen Penawaran Kontrak | Peraturan Presides RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Casa Pemerintah Pasal 6 Etika Pengadaan. | Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa | Muncul Persainganusaha yang tidak sehat | Dapat menjagaObjektifitas penilaian |
| 11 | Hasil Pemeriksaan :* Pemeriksaan Reguler,
* Pemeriksaan Kasus,
* Pemeriksaan Khusus,
* Review Laporan Keuangan,
* Evaluasi/ Pemantauan
 | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf iPeraturan MENPAN No.PERJ 04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan NO.PER/05/M.PAN/03/2008tentang i5tandar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. | Tidak Terbatas | * Menghambat kesuksesankebijakan karena adanya pengungkapari secara prematur.
* Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.

Melanggar Peraturan **MENPAN** tentang batasan distribusi LHP. | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. |
| 12 | Surat Pertanggungjawaban (SPJ} Pelaksanaan Keuangan Daerah yang belum di audit | * UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan hurufj
* Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya
 | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan olehpihak lain | Melirldungikerahasiaan dokumen |
| 13 | Kontrak Kerja PengadaanBarang/Jasa. | Perpres Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan olehpihak lain. | Menjaga kelancaranpelaksanaan pekerjaan. |
| 14 | Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar WaktuAnggota / Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota. | UU 32 tahun 2004, PP 10 Tahun2010, UU no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Sampai Penerbitan Keputusan | Akan menghambatkesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklimkondusif di lingkungan pemerintahan kab/ kota |
| 15 | Jadwal Operasi penegak perda | UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i | Tidak Terbatas | Terjadinya kebocoran Informasi | Menjaga agar operasi berjalan lancer |